

DUKUNGAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM BERSAMA LINDUNGI ANAK (BERLIAN) UNTUK MENCEGAH KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA BUKITTINGGI

Aditya Rizky Pratama^{1(a)}, Siska Sasmita^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}aditt379@gmail.com, ^{b)}ssasmita@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

02-01-2025

Diterbitkan Online:

01-03-2025

Kata Kunci:

Dukungan Pemerintah,
Bersama Lindungi Anak,
Kekerasan pada Anak

Keywords:

Government Support,
Together Protect Children,
Child Abuse

Corresponding Author:

aditt379@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i1.244>

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia di masa kini tidak dapat menyangkal pentingnya teknologi. Saat ini, manusia dapat bekerja lebih mudah berkat teknologi. Hal ini dibuktikan dari manusia sudah pasti sejak lama berhubungan dan berkomunikasi melalui berbagai media, namun perkembangan zaman saat ini yang sangat pesat adalah akibat dari perubahan masyarakat yang berbasis teknologi. Menurut Sukatin & Saputra (2023) sebagai makhluk sosial yang senantiasa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan pemerintah dalam implementasi Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari sembilan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dalam Program Berlian mencakup empat aspek utama, yaitu: pengelolaan sumber daya organisasi, pengembangan iklim keterlibatan organisasi, pengaturan tingkat pekerjaan, dan optimalisasi keterlibatan pegawai. Kendala yang dihadapi dalam implementasi program ini meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang efektivitas program perlindungan anak di tingkat pemerintah daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze government support in implementing the Joint Program to Protect Children (Berlian) and identify obstacles faced in preventing child abuse in Bukittinggi City. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews. The research informants were determined using a purposive sampling technique of nine people. The results showed that government support in the Diamond Program covered four main aspects: management of organizational resources, development of organizational engagement climate, regulation of work levels, and optimization of employee engagement. The constraints faced by implementing this program include a limited budget and human resources. This research contributes to understanding the effectiveness of child protection programs at the local government level.

berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung, manusia tidak bisa lepas dari kemajuan dan perkembangan teknologi tersebut. Menurut Ruslan & Suryaningi (2023) seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, hal itu juga akan terjadi perubahan sosial sebagai respons terhadap kekuatan lingkungan dalam masyarakat saat ini.

Mengingat populasi penduduk Indonesia yang sangat besar dengan berbagai macam

sejarah dan suku bangsa, banyak yang tidak menyadari perubahan yang sangat cepat yang dibawa oleh teknologi yang berdampak pada kebudayaan Indonesia. Adapun dampak dari zaman ini adalah meskipun zaman perkembangan ilmu dan teknologi mengalami kemajuan, dalam beberapa tahun terakhir ini masih ada juga belum banyak upaya yang dilakukan untuk menciptakan kemakmuran yang adil bagi masyarakat. Akibatnya dari dampak dari perkembangan zaman tersebut yang belum merata bagi masyarakat, maka telah melahirkan berbagai masalah sosial yang di lingkungan masyarakat. Jadi, masalah sosial yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat dapat kita lihat dengan kasat mata. Menurut Setiawan et al., (2024) adapun salah satu fenomena masalah sosial yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain pengangguran, kenakalan remaja, kemiskinan, dan sebagainya. Oleh karena itu untuk menangani atau menyelesaikan masalah sosial tersebut, maka diperlukan studi ilmu administrasi negara.

Dalam studi administrasi negara menggambarkan bagaimana pemerintah daerah setempat menawarkan solusi yang tepat dalam situasi yang kompleks ini, yang mencakup masalah sosial. Secara umum, solusi didefinisikan sebagai metode atau pendekatan yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah sosial tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Solusi dari pemerintah setempat akan memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat dan memiliki dampak yang luar biasa baik cukup positif maupun negatif. Jika masalah sosial ini tetap tidak terpecahkan, maka tidak hanya akan memengaruhi individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Sering kali, ketika masalah sosial muncul dalam kehidupan masyarakat, masyarakat pun bertanya-tanya bagaimana cara pemerintah dapat menemukan solusi yang terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi.

Dalam perspektif ilmu administrasi negara, salah satunya cara mengatasi permasalahan sosial ini adalah melalui kebijakan publik. Menurut Woll (1966) dalam Agustina (2024) kebijakan publik adalah kegiatan dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah sosial, baik secara langsung atau melalui organisasi lain yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara kolektif. Pemerintah setempat menetapkan kebijakan

publik ini yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, pemerintah telah memikirkan tujuan dari kebijakan itu adalah seketika rakyat mematuhi, sehingga kehidupan masyarakat akan berdampak positif.

Salah satu masalah sosial yang belum terselesaikan begitu saja oleh Pemerintah Kota Bukittinggi hingga saat ini adalah kekerasan terhadap anak. Menurut Anis (2018) dalam Anggraini & Asi (2022) secara umum kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang melukai atau membunuh orang lain dan menyebabkan kerugian fisik pada orang lain. Di Kota Bukittinggi ada banyak sekali jenis kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga yang mayoritas kasus kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual pada anak. Hal ini didukung oleh penelitian dari Utami & Sasmita (2023) kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bukittinggi sudah masih menjadi permasalahan utama dari apapun bentuk masalah-masalah sosial lainnya yang ada di Kota Bukittinggi ini. Adapun dampak dari kekerasan menurut Hidayarti dan Sumiyarini (2019) dalam Sari et al., (2023) adalah menyebabkan generasi anak-anak lemah yang menunjukkan perilaku agresif, apatis, pemarah, menarik diri, kecemasan berat, ketakutan berlebihan, depresi, gangguan tidur, ketidakmampuan untuk bersikap tegas, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan, dan perasaan tidak aman.

Adapun contoh salah satu kasus kekerasan pada anak adalah pertama, menurut Ningtyas & Sumarsono (2023: 105) terjadi perkelahian antara siswa SD dengan teman sebayanya di SD Trisula Perwari Kota Bukittinggi. Dalam video tersebut, terlihat beberapa siswa laki-laki dan perempuan saling menendang dan memukul seorang anak perempuan. Penyebabnya adalah karena salah satu pelaku marah dan terus menganiaya korban karena korban tidak mau memberinya uang jajan. Kemudian yang kedua, menurut Faradila (2022: 13) terjadi kekerasan di depan Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi. korban merupakan seorang siswa dari SMA Pembangunan Bukittinggi, diserang oleh salah satu pelaku dari siswa SMA tersebut hingga meninggal dunia. Hal ini beralasan karena hubungan asmara antara korban dan pelaku yang bermasalah. Ketiga, menurut Sari et al., (2023: 178) kasus penganiayaan oleh bibi

kandung berinisial EN (44) dan neneknya, AZ (62), dimana korban merupakan anak perempuan berusia 7 tahun berinisial B yang bersekolah di salah satu Sekolah Dasar di Kota Bukittinggi. Peristiwa tersebut terjadi pada Desember 2020. Korban B mengalami sejumlah luka, hasil pemeriksaan diketahui perutnya sering diinjak, dan beberapa tulang rusuknya mengalami retak diduga akibat ditendang. Tak hanya itu kakaknya, AZ (9) juga dianiaya pelaku yang sama, namun tidak separah adiknya. AZ kerap mengalami kekerasan fisik saat melindungi adiknya saat dianiaya Terakhir, menurut Zamzami (2023) kasus inses yang terjadi di Kota Bukittinggi pada Juni 2023 antara ibu kandung berinisial EY dan anak kandungnya (28) yang telah terjadi sejak si anak duduk di bangku sekolah tarbiyah atau setara dengan SMA. Pelaku diketahui sudah kecanduan hisap lem sejak berusia 13 tahun dan juga pelaku tersebut berasal dari luar Kota Bukittinggi. Saat kejadian ini, pelaku mengakui bahwa dia pertama kali melakukan hubungan seksual dengan ibu kandungnya saat membantunya di dapur. Berdasarkan penyelidikan menyeluruh, bahwa kekerasan ini dilatarbelakangi bahwa anak sama-sama menggunakan narkoba yang bersifat adiktif, dan juga bahwa kasus seperti ini belum ada kejelasannya karena banyak berita hoaks, dan keterangan pengakuan dari pelaku berubah-ubah, sehingga kasus ini menjadi simpang siur atau belum terselesaikan kronologinya yang jelas.

Sebagaimana data dan kasus kekerasan anak di Kota Bukittinggi, tabel 1 menyajikan data kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi yang dikutip dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi yang dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1. Data Kekerasan pada Anak di Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah			
	Kasus	Korban	Pelaku	Selesai
2020	20	27	21	0
2021	30	44	30	0
2022	49	50	40	2
2023	43	43	33	8

Sumber: UPTD PPA Kota Bukittinggi, 2024

Berdasarkan tabel data 1 di atas, makna data di atas adalah pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi tergolong sedikit yaitu 20 kasus, di mana jumlah korban sebanyak 27 korban, dengan jumlah pelaku 21 pelaku, dan yang sudah diselesaikan adalah 0 kasus. Sedangkan yang paling tertinggi kasus kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi yaitu pada tahun 2022 yaitu sebanyak 49 kasus, di mana jumlah korban sebanyak 49 kasus, dengan jumlah korban yaitu 50 korban, dengan jumlah pelaku sebanyak 40 pelaku, dan yang sudah diselesaikan adalah 2 kasus. Dari data di atas, mayoritas kasus yang pernah ditangani oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi adalah kasus kekerasan seksual pada anak.

Melihat gambaran data yang di atas, meskipun ada upaya bersama untuk menurunkan jumlah kasus kekerasan di kalangan anak-anak, diprediksi jumlah kasus kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi akan justru meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah Kota Bukittinggi sebelumnya berupaya untuk membuat salah satu kebijakan publik yang dapat melindungi dan mencegah kekerasan terhadap anak. Menurut Utami & Sasmita (2023) kearifan lokal yang bersumber dari *Adaik Basandi Syarak* dan *Syarak Basandi Kitabullah* juga terdapat di Kota Bukittinggi dan dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Kearifan lokal ini meliputi *Bundo Kandung* dan *Tigo Tungku Sajaringan* dalam membantu masyarakat menyadari nilai-nilai luhur budaya guna menekan angka kejadian tindak kekerasan.

Adapun bentuk dukungan dari *Bundo Kandung* yaitu mendidik anak-anaknya secara baik dan harus menjadikan rumah tangga dan keluarganya sebagai suatu lembaga pendidikan pertama, kemudian tigo tungku sajaringan meliputi *Ninik Mamak* yang bentuk dukungan yaitu memelihara anak kemenakannya agar tercapainya hidup yang sempurna baik secara lahir dan batin, demi adanya suatu keadilan dan kemakmuran di dalam masyarakat. *Alim Ulama* yang bentuk dukungan yaitu memberikan pemahaman bagi anak-anak di Kota Bukittinggi yang sesuai ajaran Islam, dan *Cadiak Pandai* yang bentuk dukungan yaitu memberikan pengetahuan yang luas tentang anak-anak di Kota Bukittinggi. Selain dukungan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota

Bukittinggi memiliki dukungan untuk mencegah kekerasan pada anak berupa pendampingan kepada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi pemberian edukasi kepada warga Kota Bukittinggi tentang cara melindungi anak dari tindak kekerasan. Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bukittinggi adalah lembaga yang juga mengelola DP3APPKB Kota Bukittinggi. Lembaga ini bertugas menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Di Kota Bukittinggi, hal inilah yang akan digunakan sebagai dukungan untuk menghentikan tindak kekerasan terhadap anak. Dukungan tersebut dapat dituangkan dalam sebuah peraturan daerah.

Adapun peraturan daerah yang menggambarkan kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Peraturan ini merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk menghentikan apapun segala kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi. Peraturan tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2015 dengan persetujuan Wali Kota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa peraturan ini merupakan landasan utama dari falsafah adat Minangkabau yang dituangkan dalam filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK), *Syarak Mangato Adat Mamakai*, dan *Anak Dipangku Kamanakan Dibimbiang Urang Kampuang Dipategangkan*. Adapun salah satu tujuan dari peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan pranata-pranata sosial dalam hal yang berhubungan dengan perlindungan anak dari kekerasan di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu dalam mewujudkan peraturan daerah tersebut, maka telah melahirkan berbagai program atau kebijakan di DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk mencegah kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi.

Menindaklanjuti dari peraturan daerah di atas, sebelumnya Kota Bukittinggi telah memiliki program terdahulu yang terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak yang juga merupakan implementasi dari peraturan daerah tersebut. Salah satu program yang menjadi bagian dari implementasi peraturan daerah tersebut adalah program Pusat

Pembelajaran Keluarga *Saayun Salangkah* atau disingkat Puspaga *Saayun Salangkah*. Puspaga *Saayun Salangkah* Kota Bukittinggi ini didirikan pada tahun 2016. Puspaga *Saayun Salangkah* Kota Bukittinggi ini merupakan unit layanan bagi keluarga dan anak di Kota Bukittinggi yang bertugas untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Puspaga *Saayun Salangkah* ini berada di bawah binaan DP3APPKB Kota Bukittinggi. Selain itu, Puspaga *Saayun Salangkah* Kota Bukittinggi ini juga mengemban amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 ayat 2 yang membahas tentang urusan pemerintahan wajib yang bukan pelayanan dasar yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, layanan Puspaga *Saayun Salangkah* Kota Bukittinggi ini juga merupakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi keluarga integratif dan holistik yang berlandaskan pada hak-hak anak. Adapun dampak dari kebijakan Puspaga *Saayun Salangkah* Kota Bukittinggi yang disebutkan di atas tadi menunjukkan bahwa Puspaga *Saayun Salangkah* Kota Bukittinggi ini memberikan rasa cukup positif terutama bagi pelayanannya bagi anak korban kekerasan yang ada di Kota Bukittinggi.

Adapun penyebab kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi memiliki banyak alasan. Pertama, dampak dari budaya luar yang membahayakan konsep ABSSBK. Kedua, meskipun telah ada pendidikan ABSSBK, prinsip-prinsip tersebut masih belum diajarkan kepada anak-anak di Kota Bukittinggi sejak usia dini, dan ketiga, masih kurangnya tanggung jawab dan perhatian orang tua terhadap anak-anak di Kota Bukittinggi. Sementara, penyebab kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi adalah kurangnya pengetahuan pegawai tentang kekerasan pada anak. Ini terlihat dari fakta bahwa pengetahuan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi saat ini belum maksimal dengan baik, terutama dalam hal pemahaman pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi tentang kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada masyarakatnya, terutama anak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bukittinggi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang

termasuk anak-anak terbebas dari kekerasan, sangat penting untuk bertindak dengan kekuatan yang paling efisien, menyeluruh, responsif, dan tepat untuk menghentikan anak-anak menjadi korban kekerasan. Lebih penting lagi adalah memastikan korban kekerasan pada anak mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan tidak ambigu. Menurut Fauzan (2024) untuk mengatasi salah satu masalah sosial ini, pemerintah daerah bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya telah melakukan beberapa upaya untuk menghindari dan mengatasi kasus kekerasan terhadap anak. Program-program yang telah dirancang dan dilaksanakan tentang pencegahan dan perlindungan bertujuan untuk melindungi korban kekerasan terhadap anak.

Sebagai perbekalan atau persiapan generasi muda bagi anak-anak di Kota Bukittinggi yang berkualitas tanpa kekerasan, Pemerintah Kota Bukittinggi menjalankan program yang bernama “Bersama Lindungi Anak” sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang disingkat dengan “*Berlian*”. *Berlian* merupakan sebuah program sosial dan advokasi dari Kementerian PPPA untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak di berbagai wilayah Indonesia. Program *Berlian* juga merupakan bagian dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Di Kota Bukittinggi, *Berlian* juga sudah termasuk bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan, dan juga Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Program *Berlian* ini memiliki tujuan bagi semua orang harus menyadari betapa pentingnya menjaga anak tumbuh dengan baik, memenuhi hak-hak mereka, dan melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Program *Berlian* di Kota Bukittinggi ini memiliki slogan “*Anakku, Anakmu dan Anak Kita Semua*”. Program *Berlian* ini telah menarik perhatian luas di kalangan masyarakat Kota Bukittinggi yang khawatir dengan langkah-langkah keselamatan anak-anak dari kekerasan saat ini. Program *Berlian* di Kota Bukittinggi ini diluncurkan pada tahun 2017, dan dilanjutkan kembali pada tahun 2022. Adapun tujuan dari kebijakan program *Berlian* di Kota Bukittinggi ini adalah untuk mencegah kasus kekerasan pada anak di

Kota Bukittinggi terulang kembali; mengurangi jumlah angka tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Kota Bukittinggi; mendorong semua orang terutama orang tua dan guru Kota Bukittinggi untuk melindungi anak dari kekerasan pada anak; mewujudkan Kota Bukittinggi Hebat demi kemajuan; dan menjadikan kota layak anak pada tahun 2030 mendatang.

Program *Berlian* Kota Bukittinggi ini merupakan kunjungan lapangan yang dilaksanakan dengan cara mengunjungi TK, KB dan PAUD yang berada di Kota Bukittinggi oleh DP3APPKB Kota Bukittinggi. Cara penyampaianya dilakukan dengan cara memberikan informasi, pendidikan, dan diskusi dengan orang tua tentang pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi. Menyikapi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bukittinggi, kasus ini sudah menjadi peringatan kepada masyarakat untuk mengenali berbagai jenis kekerasan terhadap anak. Untuk menghindari situasi tersebut, semua pihak mulai dari orang tua hingga Pemerintah Kota Bukittinggi harus bekerja sama. DP3APPKB Kota Bukittinggi saat ini sedang berupaya mewujudkan program perlindungan anak berbasis masyarakat. Adapun tantangan program *Berlian* ini bagi DP3APPKB Kota Bukittinggi cukup menantang. Oleh karena itu, DP3APPKB Kota Bukittinggi akan siap menghadapi tantangan yang dihadapi dalam menangani kejadian kekerasan pada anak untuk mengurangi kejadian dan mencegah kekerasan terhadap anak. Harapan dari Program *Berlian* di Kota Bukittinggi masyarakat Kota Bukittinggi mengatakan masyarakat Kota Bukittinggi akan resah dengan adanya kasus kekerasan terhadap anak. Dengan diperkenalkannya Program *Berlian* ini, masyarakat Kota Bukittinggi berharap dapat berperan aktif untuk Kota Bukittinggi dan memahami apa yang harus dilakukan orang tua yaitu bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Berdasarkan penelusuran oleh penulis, kajian terdahulu tentang Program *Berlian* didukung oleh penelitian Bastian & Tukiman, (2024). Jurnal ini menceritakan bahwa Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tingkat kekerasan pada anak dengan menduduki peringkat kedua di Provinsi Jawa Timur. Jurnal ini memiliki tujuan yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan program *Bersama Lindungi Anak (Berlian)* dalam mencegah dan

menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi ini dapat dikatakan belum optimal. Adapun hambatan dalam penelitian ini adalah adanya tumpang tindih antara Program Berlian dengan Satgas PPA Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, penelitian oleh Hidayati & Arif (2024). Dengan latar belakang sama yang di atas, jurnal ini memiliki tujuan yaitu mengetahui evaluasi Program Bersama Lindungi Anak dari kekerasan di lokasi yaitu Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan teori oleh William N Dunn merumuskan bahwa enam kriteria dari evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dapat dikatakan belum optimal. Untuk upayanya adalah perlu ada evaluasi yang cermat dan perbaikan dalam Program Berlian agar bisa berjalan dengan maksimal. Berdasarkan penelusuran oleh penulis sebelumnya, kajian tentang Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) untuk mencegah kekerasan pada anak ini didukung oleh Wardani et al., (2024). Kajian ini berfokus pada teori evaluasi kebijakan oleh Stufflebeam (2007) menggunakan teori CIPP yaitu konteks yang sangat jelas, input yang mencukupi, proses melalui sosialisasi, dan produk yang efektif.

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran oleh penulis terkait keterbaruan (*novelty*) atau perbedaan dari penelitian ini dengan terdahulu terkait dengan kekerasan pada anak adalah terdapat adanya perbedaan tahun dalam penelitian dan topik terdahulu yang juga membahas tentang Program Berlian yang bertujuan untuk mencegah kekerasan pada anak. Meskipun judul penelitian yang ditemukan oleh penulis berbeda, hal inilah yang mendukung penulis untuk memahami lebih mendalam tentang pencegahan kekerasan pada anak, khususnya Program Berlian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (1988) dalam Rusandi & Rusli (2021) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan fenomena permasalahan masyarakat yang berdasarkan tata cara yang berlaku dan situasi tertentu. Adapun lokasi

penelitiannya adalah DP3APPKB Kota Bukittinggi. Informan dari penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak sembilan informan yaitu lima informan dari lingkungan DP3APPKB Kota Bukittinggi, dua informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, dan dua informan dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Untuk kriteria informan melalui teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah: berada di wilayah yang sedang dipelajari yaitu Kota Bukittinggi, memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang sedang akan diteliti, mampu berargumentasi secara efektif bagi pegawai, dan mengalami dampak dari masalah yang sedang diteliti. Untuk sumber pengumpulan data, penulis menggunakan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder seperti buku, jurnal, laporan, dll. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara melalui wawancara terstruktur. Uji keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi, yang jenisnya adalah triangulasi sumber. Menurut Husnailail et al., (2024: 73) triangulasi sumber merupakan jenis triangulasi yang didapatkan dari data wawancara yang berasal dari beberapa informan dengan cara memverifikasi data yang dikumpulkan selama penelitian melalui beberapa sumber atau informan, kredibilitas data dapat ditingkatkan. Dengan demikian, teknik analisis data penulis akan melakukan tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan berakhir kepada tahap penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menyajikan hasil dan pembahasan, penulis akan menyajikan hasil penelitian terdahulu terkait kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi, dimana data kekerasan pada anak yang pernah dicatat oleh UPTD PPA Kota Bukittinggi adalah kekerasan seksual pada anak. Hal ini dibuktikan dalam penelitian oleh Bustamar & Daipon (2021: 49) mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak sudah menjadi masalah sosial terbesar di Kota Bukittinggi yang dipengaruhi oleh abainya lembaga-lembaga sosial yang ada di Kota Bukittinggi dan paling dominan adalah pregeseran nilai dari tradisional ke modern, Oleh karena itu, untuk mencegahnya ini melalui rumah ibadah melalui masjid yang berguna untuk agen perubahan bagi anak-anak di Kota Bukittinggi. Kemudian, penelitian ini didukung oleh Chairunnisa & Sasmita (2022) yang

mengatakan bahwa Program Sekolah Berkeluarga di Kota Bukittinggi merupakan Program yang dirancang untuk mengatasi kemerosotan kualitas keluarga di Kota Bukittinggi dimulai oleh Tim Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bukittinggi yang berfokus utama adalah anggota keluarga terkait anak dan perempuan yang ada di Kota Bukittinggi. Dengan menggunakan teori Everett M. Rogers, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan mudah diamati dapat dikatakan cukup memenuhi untuk inovasi Program Sekolah Berkeluarga di Kota Bukittinggi. Dengan demikian, penelitian ini juga didukung oleh Utami & Sasmita (2023) dengan kajian yang sama tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak di Kota Bukittinggi melalui *Community Governance*. Dengan latar belakang yang sama, temuan menunjukkan bahwa aspek-aspek *community governance* dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak telah berjalan baik. Komunitas mampu memenuhi semua indikator *community governance* yang dikemukakan oleh Totikidis, Amstrong & Francis yaitu *community leadership*, *community empowerment* dan *community ownership*.

Untuk lebih jelas tentang dukungan pemerintah dalam Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) untuk mencegah kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi, berikut penulis akan menjelaskan yang dikemukakan oleh Albrecht et al., (2018) yang dijelaskan sebagai berikut:

Dukungan Pemerintah dalam Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) untuk Mencegah Kekerasan pada Anak di Kota Bukittinggi

Sumber Daya Organisasi

DP3APPKB Kota Bukittinggi mengerahkan sumber daya dari Puspaga *Saayun Salangkah*, yang mana Puspaga *Saayun Salangkah* ini mengerahkan sumber daya dalam dua bidang yaitu perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Selama Program Puspaga *Saayun Salangkah* ini pada bulan Agustus dan September 2023 sedang berjalan, DP3APPKB juga mengerahkan pegawainya yaitu UPTD PPA Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi. Sementara, untuk sumber daya anggaran untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi ini, sumber daya anggaran yang

dimiliki oleh DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi ternyata tidak ada, karena sesuai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DP3APPKB Kota Bukittinggi bahwa tidak ada anggaran untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi, mayoritas anggaran program yang sering dikeluarkan oleh DP3APPKB Kota Bukittinggi adalah Program Keluarga Berencana (KB). Kecukupan sumber daya yang dimiliki DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi belum memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya tersebut untuk Program Berlian, karena sebagian dari pegawainya sedang disibukkan dengan tugas yang diberikan oleh DP3APPKB Kota Bukittinggi.

Bentuk pengembangan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi dalam Program Berlian di Kota Bukittinggi, yaitu melalui bimbingan teknis untuk perempuan dan anak dan bimbingan teknis untuk Puspaga Saayun Salangkah Kota Bukittinggi. Sementara, untuk melihat bentuk pelatihan bagi pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi, bentuk pelatihannya yaitu yang tergabung dari satuan tugas PPA dan satuan tugas dari PATBM. Kedua bentuk pelatihan dan pengembangan bagi pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi ini juga bekerja sama dengan psikolog-psikolog dan juga Polresta yang ada di Kota Bukittinggi. Sementara, untuk perekrutan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi, proses perekrutan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi tidak jelas, maka ada kemungkinan bahwa pada saat itu tidak ada perekrutan untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi. Karena nantinya akan berdampak pada pekerjaan yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, untuk melihat peraturan tentang tugas, fungsi, dan kedudukan organisasi DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk mendukung Program Berlian di Kota Bukittinggi, peraturan daerah yang terkait dengan struktur organisasi DP3APPKB Kota Bukittinggi, maka peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 55 Tahun 2021 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2022. Namun, ada peraturan daerah

terbaru yang mengatur tentang anak di Kota Bukittinggi adalah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, maka peraturan daerah yang disebutkan sebelumnya sangat mendukung program Bersama Lindungi Anak (Berlian) di Kota Bukittinggi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Program Berlian di Kota Bukittinggi ini menyesuaikan dengan SKPD DP3APPKB Kota Bukittinggi mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Polresta Kota Bukittinggi, Kodim 0304/Agam *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai*, forkompimda, Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, hingga pihak lainnya. Dengan demikian, untuk memastikan efektivitas sumber daya untuk program Berlian di Kota Bukittinggi ini, sumber daya yang cukup efektif oleh pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi ini diyakini bisa mendukung program Berlian yang ada di Kota Bukittinggi.

Dengan demikian, untuk melihat pengetahuan dan keterampilan pegawai untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi, latar belakang pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi dalam Program Berlian Kota Bukittinggi beragam. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi memungkinkan untuk mengamati pegawainya. Oleh karena itu, meskipun pemahaman pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi berbeda-beda, DP3APPKB Kota Bukittinggi sesekali mengikuti acara sosialisasi untuk mendapatkan pelatihan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, jika ada program baru yang dilaksanakan, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi dapat lebih memahami jenis-jenis tindak kekerasan pada anak tersebut. Oleh karena itu, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi turut ambil bagian dalam kegiatan yang lebih tinggi ini di tingkat pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Iklim Keterlibatan Organisasi

Ada program di Kota Bukittinggi yang dikenal dengan namanya kebijakan ramah perempuan dan anak. Adapun tujuan dari

program ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan ramah perempuan dan anak di Kota Bukittinggi terlindungi dengan baik dari segala kekerasan. Untuk keterlibatan organisasi ini, DP3APPKB Kota Bukittinggi melakukannya secara rutin. Sementara untuk bimbingannya DP3APPKB Kota Bukittinggi setiap tahunnya DP3APPKB Kota Bukittinggi melakukan bimbingan dari pihak luar yaitu perwakilan dari salah satu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPA RI).

Pengambilan keputusan terkait kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi, pengambilan keputusan untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi, DP3APPKB Kota Bukittinggi menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Satuan Kerja Wali Kota Bukittinggi Bidang Perlindungan Anak yang dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Bukittinggi. Untuk melihat pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi yang bertugas dalam pengambilan keputusan terkait Program Berlian di Kota Bukittinggi.

Permasalahan utama dari keterlibatan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi dalam pengambilan keputusan untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi, permasalahannya adalah terletak pada campur tangan antara pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi dengan instansi lainnya terkait pencegahan kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dan potensi bahwa pilihan keputusan yang diambil oleh pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi dengan antar instansi lainnya juga dapat memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak dan perempuan yang ada di Kota Bukittinggi.

Dari permasalahan di atas, adapun solusi permasalahan dalam pengambilan keputusan lain dalam Program Berlian di Kota Bukittinggi adalah apabila terjadi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi, maka pengambilan keputusan bagi pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi akan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Oleh karena itu, jika ketepatan pengambilan keputusan terkait kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi, maka pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi akan mengerahkan petugas untuk menangani setiap

kasus tindak kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi. Petugas tersebut nantinya akan bertindak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mempertimbangkan kepentingan anak yang ada di Kota Bukittinggi.

Dengan demikian untuk dampak pengambilan keputusan bagi pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi adalah jika pengambilan keputusan yang tepat bagi pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi, maka akan berdampak baik bagi tumbuh kembang anak di Kota Bukittinggi. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan yang tidak tepat bagi pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi dalam Program Berlian di Kota Bukittinggi, maka akan menghambat tumbuh kembang anak di kota tersebut jika pilihan para pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi tidak tepat.

Tingkat Pekerjaan

Pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi ini mematuhi peraturan yang berlaku, karena tingkat pekerjaan yang pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi ini untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi tidaklah sulit atau mudah. Akibatnya, aturan-aturan ini menjadi landasan bagi kegiatan Program Berlian di Kota Bukittinggi.

Kemampuan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi sudah disesuaikan dengan kebutuhan DP3APPKB Kota Bukittinggi. Pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi yang ditugaskan dalam Program Berlian harus melatih pegawainya agar bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sebaliknya tidak bisa melatih pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi, makanya pekerjaan pegawai bagi DP3APPKB Kota Bukittinggi tidak berjalan dengan baik juga.

Sementara, untuk melihat hubungan pimpinan DP3APPKB Kota Bukittinggi dengan pegawai untuk Program Berlian Kota Bukittinggi hubungannya adalah sangat baik karena para pimpinan DP3APPKB Kota Bukittinggi senantiasa berupaya mengakomodasi para pegawainya agar mereka dapat belajar dari pimpinan DP3APPKB Kota Bukittinggi.

Permasalahan bagi pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi terkait tingkat pekerjaan untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi permasalahannya adalah bantuan dana tersebut saat ini masih belum menentu. Oleh karena itu,

pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi harus dapat memanfaatkan Program Berlian di Kota Bukittinggi secara maksimal, namun idealnya jumlah tersebut tidak berlebihan. Oleh karena itu, agar Program Berlian di Kota Bukittinggi dapat berjalan lancar, maka pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi perlu terlibat aktif dalam pengelolaan dananya.

Keterlibatan Pegawai

Pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi turut terlibat dalam Program Berlian di Kota Bukittinggi. Dalam Program Berlian, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi memberikan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Bukittinggi yang disebarkan kepada seluruh masyarakat Kota Bukittinggi, serta kepada Tim Penanganan Kekerasan terhadap Anak mulai dari satuan SD hingga SMA yang ada di Kota Bukittinggi dan UPTD PPA Kota Bukittinggi. Seluruh pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi turut serta dalam pelaksanaan Program Berlian, khususnya yang bergerak di bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) DP3APPKB Kota Bukittinggi. Begitu pula dengan pemasangan baliho, spanduk, dan poster yang berisi anjuran pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.

Untuk mendukung inisiatif dalam Program Berlian di Kota Bukittinggi, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi mengikuti apa yang direncanakan sebelumnya oleh pegawainya. Untuk melaksanakan tindakan ini, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi biasanya memulai dengan mengumpulkan informasi tentang kekerasan anak di Kota Bukittinggi. Setelah mengembangkan program tersebut, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi akan menerapkan program tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi sangat mendukung untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi karena pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi mendukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang nantinya akan berdampak positif bagi anak-anak di Kota Bukittinggi. Meskipun undang-undang yang disebutkan di atas, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi sangat mendukung undang-undang

untuk pencegahan kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi. Harapan dari undang-undang tersebut adalah agar bisa mendukung dan membantu bagi pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk pencegahan kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi.

Suasana Kantor DP3APPKB Kota Bukittinggi ini untuk mendukung Program Berlian di Kota Bukittinggi, Kantor DP3APPKB Kota Bukittinggi bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) ini ternyata masih kurang kondusif, dimana pegawai Bidang PHA DP3APPKB Kota Bukittinggi berjumlah empat orang. Meskipun Kantor DP3APPKB Kota Bukittinggi bidang PHA yang kurang kondusif dan kekurangan pada pegawai bidang PHA DP3APPKB Kota Bukittinggi, Program Berlian di Kota Bukittinggi ini dapat bisa berjalan dengan baik.

Untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi ini cukup mendukung, walaupun tugas dan kerja pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi sangat banyak yang diberikan oleh pimpinan DP3APPKB Kota Bukittinggi. Dengan demikian, untuk mengatasi keterlibatan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi dalam Program Berlian di Kota Bukittinggi adalah pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi melakukan dengan cara diskusi oleh pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk memberikan masukan, saran, dan keluhan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi.

Kendala dalam Dukungan Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) untuk Mencegah Kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi

Berikut merupakan kendala dukungan pemerintah dalam program bersama lindungi anak (Berlian) untuk mencegah kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi yang dijelaskan sebagai berikut:

Kendala Finansial

Program Berlian di Kota Bukittinggi membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga anggaran tersebut belum berjalan dengan baik. Jika dananya mencukupi, pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi akan menyampaikan melalui sosialisasi kepada UPTD PPA Kota Bukittinggi agar Program Berlian dapat melindungi anak-anak di Kota Bukittinggi.

Kendala Sumber Daya Manusia

Pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi belum berjalan secara maksimal terutama kepada pengerahan pegawainya untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi. Jadi pengerahan pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk Program Berlian di Kota Bukittinggi dikatakan belum maksimal karena hak kondisi untuk pembinaan pegawai dari Pemerintah Kota Bukittinggi.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah dukungan pemerintah dalam Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) untuk mencegah kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi ini keterlibatan sumber daya organisasi yang jelas, terlaksananya iklim keterlibatan organisasi secara rutin, tingkat pekerjaan yang mudah, dan keterlibatan pegawai yang partisipatif. Dengan demikian, kendala dukungan pemerintah dalam Program Bersama Lindungi Anak untuk mencegah kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi yaitu kendala finansial dan kendala sumber daya manusia.

Untuk implikasi teoritis, berdasarkan dimensi menunjukkan bahwa dukungan pemerintah dalam Program Berlian untuk mencegah kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi ini sudah dikatakan cukup mendukung untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di mana telah menjadi agenda prioritas utama Pemerintah Kota Bukittinggi setiap tahunnya. Sedangkan untuk implikasi praktis, hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait pegawai DP3APPKB Kota Bukittinggi untuk mendukung Program Berlian untuk mencegah kekerasan pada anak di Kota Bukittinggi.

Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui DP3APPKB Kota Bukittinggi perlu melakukan evaluasi berkala terhadap dukungan pemerintah dalam Program Berlian dengan mengukur dampaknya terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak. Diharapkan Pemerintah Kota Bukittinggi dapat memperkuat dukungan pemerintah dalam Program Bersama Lindungi Anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, M. (2024). Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai dengan Kehendak Rakyat. *Sakola: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(1), 20–24.
<https://doi.org/10.57235/SAKOLA.V1I1.2205>
- Albrecht, S., Braidahl, E., & Marty, A. (2018). Organizational Resources, Organizational Engagement Climate, and Employee Engagement. *Career Development International*, 23(1), 67–85.
<https://doi.org/10.1108/CDI-04-2017-0064>
- Anggraini, S., & Asi, M. F. (2022). Hubungan Parenting Stress dengan Perilaku Kekerasan pada Anak. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2747–2754.
<https://doi.org/10.47492/JIP.V2I8.1160>
- Bastian, M. A., & Tukiman. (2024). Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. *Ilmu Administrasi dan Sosial*, 13(1), 112–127.
<http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>
- Bustamar, & Daipon, D. (2021). Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masjid Di Kota Bukittinggi. *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 9(1), 48–66.
<https://doi.org/10.15548/turast.v9i1.2249>
- Chairunnisa, & Sasmita, S. (2022). Difusi Inovasi dalam Program Sekolah Keluarga : Pengalaman dari Kota Bukittinggi. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 118.
<https://doi.org/10.20961/sp.v17i2.64641>
- Fauzan, R. (2024). Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan. *Journal of Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*, 1(2), 96–118.
<https://doi.org/10.61511/JGEDSIC.V1I2.2024.387>
- Hidayati, D. N., & Arif, L. (2024). Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak Dari Kekerasan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 164.
<https://doi.org/10.31258/jkp.v15i2.8464>
- Husnulloil, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(0), 1–23.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
<https://doi.org/10.55623/AU.V2I1.18>
- Ruslan, R. D. M., & Suryaningsi. (2023). Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 52–61.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i9.914>
- Sari, N., Neherta, M., & Fajria, L. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Anak Usia Sekolah dalam Keluarga di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Jurnal Ners*, 7(2), 894–900.
<https://doi.org/10.31004/JN.V7I2.15045>
- Setiawan, E. D., Mahendra, F. H., Herawatie, N. S., & Kusmawati, A. (2024). Analisis Tingkat Pengangguran sebagai Masalah Sosial yang Tak Kunjung Usai. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 2(1), 312–322.
<https://doi.org/10.59581/HARMONI-WIDYAKARYA.V2I1.2709>
- Sukatin, & Saputra, M. Z. (2023). Teknologi dan Moral Seorang Pelajar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(7), 757–764.
<https://doi.org/10.59141/JAPENDI.V4I7.2083>
- Utami, V. N. H., & Sasmita, S. (2023). Community Governance dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 137–158.
<https://doi.org/10.47134/VILLAGES.V4I2.53>

Wardani, A. A., Alfianingrum, D., Dzaki, A. A., Firmansyah, F. Y., & Arundinasari, I. (2024). Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP)*, 5(2), 127–147.
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v5i2.8850>

Zamzami, F. (2023). *Kasus Inses Ibu dan Anak di Bukittinggi, Terduga Pelaku Alami Gangguan Jiwa, Keterangan Berubah-ubah*.
<https://aceh.tribunnews.com/2023/06/27/kasus-inses-ibu-dan-anak-di-bukittinggi-terduga-pelaku-alami-gangguan-jiwa-keterangan-berubah-ubah>. Diakses 30 Desember 2024.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.